

INOVASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI DESA KERTAYASA KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS

Muhammad Farhan Firmansyah¹, Muhammad Hasby AS², Fajar Dewi Ayuni³,
Ajeng Sri Sundanis⁴, Susi Larini⁵

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3,4,5}
E-mail: firmansyahmuhammadfarhan@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah hal yang sangat dibutuhkan di era sekarang, hal tersebut mengacu kepada UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada ayat 1 pasal 86 dapat terjabar bahwa desa mempunyai hak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang berkembang oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pelaksanaannya bisa menggunakan APBN, APBD, ataupun APBDes tergantung dengan kondisi yang ada pada daerah tersebut. Sistem Informasi Desa atau SID digunakan untuk membantu kinerja pemerintahan desa sehingga dapat lebih efisien dalam pengelolaan administrasi dan tata desa. Manfaat yang didapatkan dalam pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) yaitu mempercepat pengelolaan data desa, mempercepat pelayanan desa dan transparansi pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Inovasi, Sistem Informasi Desa, E-Government*

ABSTRACT

The development of the Village Information System (SID) is something that is really needed in the current era, this refers to Law no. 6 of 2014 concerning villages in paragraph 1 of article 86 it can be explained that villages have the right to get access to information through a village information system developed by the regency or city regional government. The implementation can use the APBN, APBD, or APBDes depending on the conditions in the area. The Village Information System or SID is used to assist village government performance so that it can be more efficient in managing village administration and administration. The benefits obtained in the development of the Village Information System (SID) are accelerating village data management, accelerating village services and transparency of village government.

Keywords: *Innovation, Village Information System, E-Government*

PENDAHULUAN

Dinamika model inovasi dan praktik inovasi pada sektor pemerintahan semakin berkembang sejalan dengan menguatnya era *New Public Management* (NPM) pada awal 90-an. Merujuk pada buku karya Osborne dan Gaebler - "*Reinventing Bureaucracy: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*", paradigma NPM menjadi pelopor pola kerja *customer-orientation* yang memaksa birokrasi untuk beradaptasi dengan

inovasi dan kompetisi (Osborne & Gaebler, 1993). Budaya inovasi yang sebelumnya melekat pada prinsip kerja sektor swasta, saat ini telah menjadi nilai dasar dalam sektor publik, khususnya di era *agile bureaucracy*.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan inovasi menjadi urgen, Pemerintah Daerah melalui amanat PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, telah berupaya mendorong inovasi dan modernisasi pembangunan pada tingkat provinsi,

kabupaten/kota, dan desa. Desa sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan administratif di Indonesia, dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dan terus meningkatkan kemampuannya didalam mengelola data administrasi kependudukan desa.

Pengelolaan sistem pemerintahan desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan manfaat diantaranya mendukung pengambilan keputusan (Saymote, 2014), sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa (Mayowan, 2016) Serta menjadi sarana pertanggungjawaban perangkat desa atas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mandiri dan akan mengurangi kesenjangan digital dan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat (Praditya, 2014).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan merupakan penerapan Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES RI) Nomor 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi, serta penerapan Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Hal ini merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui *e-Government* (Raihan, Amin and Dama, 2017) untuk menuju kantor pemerintahan desa dapat memberikan layanan public yang cepat, tepat sasaran dan melaksanakan visi pemerintah yang tertuang dalam yaitu Inpres No. 3 tahun 2003 yaitu menuju *good government*.

Di Indonesia, dukungan nyata pemerintah guna memunculkan produk inovasi pemerintah dalam implementasi e-government dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Kebijakan ini dijadikan sebagai stimulus (pendorong) bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi dalam pengambilan kebijakan dan kegiatan administrasi pemerintahan menjadi sangat penting, karena tanpa adanya inovasi, sistem pemerintahan akan mengalami kehancuran dan tidak efektif, kehilangan kemampuan untuk memerintah, dan menjadi sasaran kritik dan kegagalan (Farazmand, 2004:1).

Salah satu Inovasi Desa yang saat ini banyak digunakan yaitu banyaknya produk sistem informasi Desa seperti antara lain SIDEKA (Sistem Informasi Desa dan Kawasan), (Sistem Informasi Desa dan Kawasan) yang diinisialisasi dan dikembangkan oleh BP2DK (Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa Dan Kawasan), dan SID (Sistem Informasi Desa) yang dikembangkan oleh Combine Institute (Susanto and Proboyekti, 2016) .

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan bagian dari implementasi *e-Government* yang merupakan alat bantu bagi desa untuk menyelesaikan permasalahan yang sering muncul pada saat pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan penduduk desa yang meliputi penduduk asli dan penduduk pendatang. Desa berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui system informasi desa yang telah dikembangkan. Sistem ini merupakan sistem informasi tepat guna dengan tujuan untuk memajukan masyarakat dengan mempermudah proses pengelolaan data di kantor desa.

Di Indonesia, implementasi *e-Government* dilaksanakan setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Inpres ini dibuat sebagai dasar untuk menyamakan pandangan Pemerintah dalam menyelenggarakan sistem

pemerintahannya sehingga terwujud pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta adanya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan ini menjadi alat penghubung antara *government* dengan *government* (G2G), *government* dengan staf (*employee*) (G2E), dan *government* dengan masyarakat (*citizen*) (G2C) (Maulana et al., 2019: 409-410).

Implementasi *e-Government* lebih banyak diterapkan di perkotaan, hal ini dikarenakan pelaksanaan *e-Government* di sebagian pedesaan masih terkendala minimnya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan kurangnya sumber daya manusia yang handal yang memiliki kemampuan dibidang TIK, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kantor-kantor pemerintahan desa yang menggunakan mesin ketik dalam melayani masyarakat.

Penerapan *e-Government* desa memerlukan suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh sehingga penerapan TIK bisa berjalan sesuai dengan fungsinya dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat telah diimplementasikan. Tanpa perencanaan yang baik seringkali penerapan teknologi informasi akan terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal dengan investasi yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan (Asyikin, Fitri and Nugroho, 2016).

Di Desa Kertayasa teridentifikasi beberapa kelemahan dalam mewujudkan pelayanan berbasis *e-Government* diantaranya fasilitas serta Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari penyelenggara maupun Yang menerima pelayanan. Kemudahan akses serta Sosialisasi ke masyarakat sangat Perlu untuk mewujudkan pelayanan Berbasis *e-Government*, mayoritas Penduduk desa mengukumi sebagai Petani dan jauhnya pemahaman Digitalisasi mengharuskan Sosialisasi kepada semua masyarakat. Dan untuk mempermudah akses

pelayanan segala sesuatu bentuk Informasi maupun pelayanan di dalam Satu platform SID yaitu di dalam website Desa. Untuk mendapatkan akses Informasi dan pelayanan masyarakat.

METODE

Pelaksanaan pengabdian dilakukan selama 6 bulan (September-Februari 2023), yang terdiri dari observasi wilayah, identifikasi, penentuan tujuan, pelaksanaan dan evaluasi. Susunan tim pelaksana terdiri dari 7 orang, yang terdiri dari 4 orang yang bertugas untuk melakukan observasi, survey lokasi pengabdian, mengumpulkan data profil desa dan Menyusun laporan pengabdian, yang dibantu oleh 2 Mahasiswa dan 1 Dosen Pembimbing Lapangan dalam proses pembuatan website dan melatih admin desa. Adapun tahapan metode pelaksanaan secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut :

Observasi

Observasi merupakan salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Observasi berarti memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indra peneliti yang sering kali instrument atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah (Creswell, 2015). Yang menjadi subjek observasi pada pengabdian masyarakat ini adalah desa kertayasa. Observasi dilakukan secara langsung oleh mahasiswa KKN-Tematik terkait dengan Inovasi Sistem Informasi Desa

Identifikasi

Identifikasi dilakukan dengan Teknik wawancara langsung namun sifatnya tidak terstruktur pada aparat desa. Dalam pengabdian ini pelaksana menggunakan Langkah wawancara menentukan pertanyaan riset yang bersifat terbuka yang akan dijawab dalam wawancara tersebut, mengidentifikasi mereka yang akan di wawancarai yang dapat menjawab pertanyaan wawancara dengan baik dalam hal ini Kepala Desa dan aparat desa sebagai subjek pengabdian, menentukan tipe

wawancara yang praktis dan yang dapat menghasilkan informasi yang dapat menjawab pertanyaan, serta merancang dan menggunakan protokol wawancara atau panduan wawancara (Creswell, 2015) dari hasil wawancara akan didapatkan hasil dari objek pengabdian masyarakat yaitu inovasi sistem informasi desa dalam *e- government*.

Penentuan Tujuan

Dari hasil yang didapatkan saat observasi hingga identifikasi dapat diambil kesimpulan bahwa Desa Kertayasa membutuhkan media yang dapat digunakan sebagai sarana dalam penyebaran informasi dan inovasi desa. Hal yang dapat diimplementasikan ialah pembuatan dan pemanfaatan website desa yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan desa dalam bidang teknologi dan informasi.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan 5 tahapan yakni: Sosialisasi kegiatan, pengumpulan data profil desa, pembuatan website, pelatihan admin penggunaan *website* dan pendampingan penggunaan *website* sebagai media informasi dan inovasi desa Kertayasa. Tahapan pembuatan *website* akan dilakukan oleh narasumber, kemudian tahapan pelatihan akan dilakukan oleh pelaksana pengabdian kepada aparat desa sebagai pengelolaan dan penggunaan *website* desa nantinya. Adapun proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian

Evaluasi

Proses atau tahapan terakhir dari kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian yaitu evaluasi, hal ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan pada tahapan yang sudah dilaksanakan dan untuk tahapan yang akan dilanjutkan. Kegiatan evaluasi yang dilakukan diantaranya menyediakan data-data atau informasi yang dibutuhkan sebagai konten *website* dan melakukan pendampingan serta pengertian kepada aparatur desa.

Prosedur kerja

Prosedur kerja adalah urutan-urutan yang telah dibuat dalam Melakukan suatu pekerjaan dimana Terdapat tahapan demi tahapan yang Harus dilalui sehingga terlihat jelas Adanya aturan yang harus ditaati oleh Orang yang akan menjalankan prosedur Kerja pada bidang tugas yang telah Mereka kerjakan dan membuat suatu pekerjaan itu mudah dimengerti dan Pahami. Komunikasi dengan beberapa Stakeholder merupakan hal yang Sangat penting dalam mewujudkan Pelayanan berbasis *e-Government* Terutama dengan pihak pemerintahan Desa Mangkubumi.

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan

Mitra menyediakan tempat Serta sub akan disempurnakan sekaligus Mempersiapkan bahan baik itu secara Administrasi surat maupun informasi Yang akan di publikasi di website desa, Selain itu mitra juga menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang akan melanjutkan dan Menyelaraskan SID di Desa Kertayasa. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program adalah menyediakan lokasi dan pekerja untuk turut serta dalam proses perencanaan hingga uji coba prototipe. Masing-masing mitra.

Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif kualitatif. Objek Penelitian ini berkaitan langsung dengan Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam tata Kelola Pemerintahan Desa. Sumber data (subjek penelitian) diambil secara Purposive sampling. Adapun subjek Penelitiannya berjumlah 3 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian Perencanaan (Operator Website Desa). Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini dengan tiga cara yaitu Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif terdiri dari tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan Data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan

proses Menemukan kesimpulan dengan Mengecek ulang dari berbagai sudut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem informasi desa (SID) merupakan bagian dari implementasi *e-Government* yang merupakan alat bantu bagi desa untuk menyelesaikan permasalahan yang sering muncul pada saat pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan penduduk desa yang meliputi penduduk asli dan penduduk datang. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang telah dikembangkan. Sistem ini merupakan sistem informasi tepat guna dengan tujuan untuk memajukan masyarakat dengan mempermudah proses pengelolaan data di kantor desa.

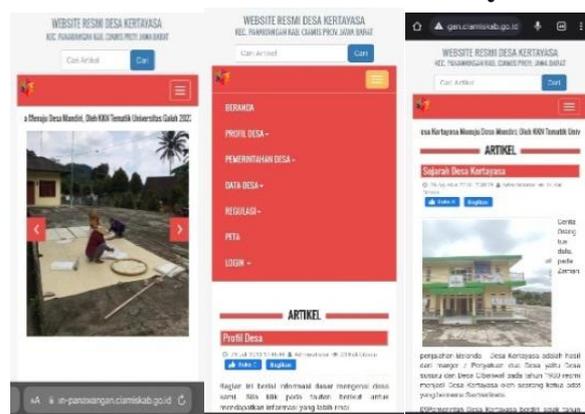
Berdasarkan *E-Government Development Global Index* (EDGI), perkembangan *e-government* di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan yang semula berada di ranking 88 di tahun 2022 naik menjadi ranking 77 Hal ini menunjukkan upaya pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah berjalan dengan baik. Meski begitu masih banyak kekurangan yang harus diperhatikan, contohnya saja saat ini Jumlah pemerintah daerah yang mengembangkan *e-government* baru mencapai tahapan pemanfaatan baru sebanyak 4 (empat) pemerintah daerah atau sebesar 0,7% dari 548 pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Di Kabupaten Ciamis khususnya di Kecamatan Panawangan dari 18 Desa belum ada satupun desa yang memiliki Sistem Informasi Desa (SID), hal ini mendorong para mahasiswa KKN-T di Desa Kertayasa untuk memberikan inovasi berupa pembuatan Sistem Informasi Desa berbasis teknologi dengan membuat *website* desa.

Tanpa perencanaan yang baik sering kali penerapan teknologi informasi akan terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal dengan investasi yang tidak sesuai dengan apa

yang di harapkan. Saat ini beberapa desa di Kabupaten Ciamis, di dalam sistem pelayanan administrasi kependudukan desa masih banyak yang bersifat konvensional, sehingga berakibat kepada perangkat desa maupun penduduk desa, dimana pada peroses pengelolaan data sering terjadi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh manusia, pemborosan waktu dan biaya.

Saat ini telah dikembangkan banyak produk sistem informasi desa yang telah dikembangkan seperti antara lain SIDEKA (Sistem Informasi Desa dan Kawasan) yang di inialisasi dan dikembangkan oleh BP2DK (Badan Prakarsa pemberdayaan desa dan Kawasan), dan SID (Sistem Informasi Desa) yang dikembangkan combine institute pengembangan SID ini diharapkan mampu memberikan inovasi bagi kantor pemerintahan desa khusus nya di Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis sehingga mampu meningkatkan kinerja perangkat desa di tinjau dari segi kualitas pelayanan terhadap masyarakat, responsivitas, responsibilitas, dan produktivitas.

Gambar 1. Website Desa Kertayasa



Sumber: Website Desa kertayasa

Saat ini Desa Kertayasa sudah memiliki sistem informasi desa sendiri yaitu: <http://kecamatan-panawangan.ciamiskab.go.id/kertayasa/> disana sudah tersedia berbagai macam informasi mengenai Desa Kertayasa dan berita mengenai segala macam kegiatan yang sudah terlaksana.

Gambar 2. Dokumentasi Pelepasan Mahasiswa KKN-T Kertayasa



Sumber: Dokumentasi KKN-T

Kutipan dan Acuan

Transformasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan secara masif dan konsisten mengusung inovasi berbasis teknologi. Sejak saat itu pula, di awal era 4.0, polemik *governance* dan pembangunan semakin kompleks, pemerintah dihadapkan dengan beragam peluang dan tantangan inovasi di berbagai lini. Pergeseran ritme kerja birokrasi berubah drastis. Revolusi industry 4.0 semakin memantapkan praktik *e-government* sebagai sebuah keniscayaan. Pada era ini, inovasi memungkinkan pemerintah, industri, dan masyarakat untuk tanggap terhadap perubahan (Pyburn & Woodhill, 2015:7).

SID dibangun dengan berbasis komputer dan *website*, sehingga informasi ini dapat diakses oleh setiap warga. Sedangkan lisensi SID dikembangkan dalam *platform* sistem perangkat lunak bebas dan terbuka, yang berarti dapat digunakan, disalin, didistribusikan, dipelajari, maupun ditingkatkan kinerjanya oleh siapapun dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan di lapangan (Wilhem Wau, 2012:8).

Secara garis besar dikatakan bahwa warga masyarakat membutuhkan informasi tentang berbagai masalah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan baik dalam tahap rencana, pelaksanaan bahkan

evaluasinya (Duddy Zein dan Agus Setiawan, 2015:82).

KESIMPULAN

Dengan demikian kesimpulan yang bisa dijelaskan dari hasil yang sudah dilaksanakan adalah sistem informasi desa merupakan hal yang sangat dibutuhkan di era sekarang, hal tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahwa pemerintah desa melakukan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kegiatan pengabdian dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya serta ketersediaan perangkat kelembagaan, seperti program kerja dan pedoman kerja yang dapat menunjang efektivitas pengelolaan *website* disebuah pemerintah desa yakni Desa Kertayasa. Dalam pengabdian ini tentu juga dapat membangun media inovasi desa sehingga mampu menjadi pengantar bagi pengembangan sebuah potensi desa, meningkatkan kualitas pengelolaan *website* desa sehingga menaikkan nilai informasi yang tersedia guna kemanfaatan potensi desa, dan memberikan solusi kepada kelompok masyarakat terhadap kendala lemahnya kapasitas pengelolaan *website* desa sebagai suatu media inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Desy Amelia Nurgiarta & Hj. Weni Rosdiana. S.Sos., M.AP. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (Pid) Di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. *Jurnal Administrasi Negara*, Hal 1 - 8.
- Irfan Nursetiawan, Rifki Agung Kusuma Putra. (Desember, 2021). Data Dan Sistem Informasi Desa Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Universitas Galuh*, Volume 8 Nomor 3, Hlm 463 - 470.
- Mochammad Rozikin, Wa Hesty & Sulikah. (Maret, 2020). Kolaborasi Dan E-

- Literacy Kunci Keberhasilan Inovasi *E-Government* Pemerintah Daerah . *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16 No. 1. Hal 61 - 80.
- Nasrullah. (2016). Implementasi Elektronik *Government* Dalam Mewujudkan *Good Governance* Dan *Smart City* (Studi Kasus: Pemerintah Kota Makassar). *Stmik Handayani Makassar*.
- Rahmat Rafinzar & Kismartini. (Agustus, 2020). Inovasi *E-Government* Dalam Pelayanan Publik (Studi Faktor Pendukung Dan Penghambat Program E-Musrenbang Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 No. 2. Hal 228 - 236.
- Wandi Abbas & Sutrisno. (Maret, 2022). Pengembangan *Website* Desa Sebagai Sistem Informasi Dan Inovasi Di Desa Indu Makkombong Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia. Universitas Sulawesi Barat*, Vol. 2 No. 2, Hal 505 - 512.
- Wau, Wilhem. (2012). Sistem Informasi Desam Mengelola Sumber Daya Lokal Untuk Kemandirian Desa. Yogyakarta: *Combine Resource Institution (CRI)*.
- Zein, Duddy dan Setiawan, Agus. IRwansyah, dkk. (ed). (2015). Prosiding Konferensi Nasional KOMunikasi 2015. Konsep, Kerangka Kerja Kreatifitas Karya Kultur Jilid II: Strategi Komunikasi Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Jakarta: *Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)*.